

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menceritakan demokrasi di Indonesia sebagai sebuah pengalaman kebangsaan akan sejajar dengan menceritakan Indonesia sebagai sebuah negara, dari persiapan awal masa pra-kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Demokrasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran luar Indonesia. Dengan kata lain, secara konseptual dinamika demokrasi Indonesia sebagai praktik dan wacana banyak dipengaruhi oleh perkembangan demokrasi di luar Indonesia. Belakangan hal tersebut menjadi objek studi kegiatan akademik, tidak hanya untuk mencari unsur-unsur budaya lokal yang sinergis dengan demokrasi, tetapi juga mengarah pada mengkaji perilaku kehidupan masa lampau yang secara praktis sedikit mencerminkan perilaku inti demokrasi, walaupun tidak disebut sebagai “demokrasi” itu sendiri.<sup>1</sup>

Mengutip Miriam Budiardjo (1983) dapat diketahui bahwasanya perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sepanjang Indonesia berdiri masalah krusial Indonesia sebagai negara bangsa adalah bagaimana mensinergikan pluralitas masyarakat terkait dengan sistem demokrasi yang dipilih.

---

<sup>1</sup> Saiful Arif dan Heri Seiyono, *Sejarah dan Budaya Demokrasi (Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Bangsa)* (Malang: Averroes Press, 2013), Hlm. 10.

Demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat periode, sebagai berikut: *Pertama*, periode 1945-1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Sistem Parlementer mulai diberlakukan sebulan sesudah kemerdekaan diproklamkan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi masyarakat Indonesia untuk memberlakukan demokrasi model barat, telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Dengan kegagalan partai-partai dalam Majelis Konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara terkait undang-undang dasar baru, hal tersebut mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang menegaskan berlakunya kembali undang-undang dasar 1945. Dengan demikian, masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir, digantikan oleh Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*) yang memposisikan Presiden Soekarno menjadi pusat kekuasaan negara.<sup>2</sup>

*Kedua*, periode 1959-1965. Periode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*). Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peran tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat. Sekalipun UUD 1945 memberi peluang seorang presiden untuk

---

<sup>2</sup> A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegah Korupsi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 89.

memimpin pemerintahan selama lima tahun, ketetapan MPRS No. III/1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dengan lahirnya ketetapan MPRS ini secara otomatis telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagai ketetapan UUD 1945. Kepemimpinan Presiden Soekarno tanpa batas ini, terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang dasar 1945. Misalnya, pada tahun 1960 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak memiliki kewenangan untuk berbuat demikian. Dengan kata lain, sejak diberlakukan Dekrit Presiden 1959 telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh Presiden Soekarno. Perilaku politik PKI yang sewenang-wenang ini tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh partai politik lainnya dan kalangan militer (TNI), yang pada waktu itu merupakan salah satu komponen politik penting Presiden Soekarno. Akhir dari sistem demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologis antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965.<sup>3</sup>

*Ketiga*, periode 1965-1998. Demokrasi Terpimpin ala Presiden Soekarno telah diganti oleh elite orde baru dengan demokrasi pancasila. Beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk Presiden Soekarno telah dihapuskan dan di ganti dengan pembatasan jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu. Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. Pertama, demokrasi dalam bidang politik pada

---

<sup>3</sup> A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegah.....* Hlm. 90.

hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Ketiga, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak.<sup>4</sup>

*Keempat*, periode Pasca-Orde Baru. Periode ini sering disebut dengan era Reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan Reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan orde baru pada Mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan demokrasi pancasilanya. Penyelewengan atas dasar negara pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar negara tersebut.<sup>5</sup>

Menurut M.C. Ricklefs dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Bahwa, demokrasi Indonesia berawal pada percobaan demokrasi pada tahun 1950-1957, dilanjutkan dengan Demokrasi Terpimpin yaitu pada tahun 1957-1965. Lalu dilanjutkan menciptakan Orde Baru pada tahun 1965-1975 dan dilanjutkan kembali pada masa keemasan Orde Baru 1976-1988 setiap dalam kejayaan pasti ada keruntuhan, masa keruntuhan dan kehancuran Orde Baru pada tahun 1989-1998. Setelah itu pemerintahan di lanjut dengan masa Reformasi hingga sekarang.

---

<sup>4</sup> A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegah.....* Hlm. 91.

<sup>5</sup> A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegah.....* Hlm. 91.

Berdasarkan ciri-ciri sistem demokrasi tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 tentang sistem pemerintahan Negara angka Romawi III dijelaskan “Kedaulatan Rakyat”. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai mula kekuasaan negara. Oleh karena itu “rakyat” merupakan paradigma sentral kekuasaan negara.<sup>6</sup>

Terlihat pada A. M. Fatwa mengkritik kebijakan Demokrasi Terpimpin dalam pemerintahan Soekarno, dan dilanjut dengan mengkritik kebijakan pemerintahan Soeharto. Kekejaman rezim pada masa Soeharto melalui tangan militer sehingga masyarakat Indonesia tertekan dan tingkat keadilan pada masyarakat pun semakin menjadi memburuk.<sup>7</sup>

Maka dengan secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pandangan A. M. Fatwa tentang demokrasi Indonesia adalah suatu sejarah peristiwa pasang surut pemerintahan di Indonesia yang bertujuan sama yaitu untuk memajukan negara Indonesia, walaupun pemerintahan negara hanya memanfaatkan kekuasaan sebagai tidak kepuasan memimpin.

Sikap A. M. Fatwa terhadap pemerintah dengan melakukan perlawanan demi kemaslahatan masyarakat yaitu menegakkan keadilan hingga diadili bertahun-tahun. Dengan peristiwa yang dialaminya, A. M. Fatwa berpendapat

---

<sup>6</sup> Wigih Adi Wibowo. 2013. *Penjabaran Demokrasi Menurut UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen 2002*. Dalam <http://wiare.blogspot.com/2013/02/penjabaran-demokrasi-menurut-uud-1945.html?m=1>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2018.

<sup>7</sup> A.M. Fatwa. *Demi Sebuah Rezim (Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili)*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000). Hlm. xv

bahwa Demokrasi di Indonesia telah ditafsirkan bukan bagaimana seharusnya yang dibenarkan oleh aturan permainan, melainkan bagaimana kebutuhannya.

Menurut A. M. Fatwa dalam Prospek Demokrasi di Indonesia, gerakan Reformasi yang berhasil menumbang rezim Orde Baru yang otorianistik menjadi bagian dari episode sejarah demokrasi Indonesia. Wakil Ketua MPR-RI Periode 2004-2009 ini mengatakan ada beberapa poin yang menyebabkan kaburnya nilai demokrasi diantaranya disebabkan oleh: lembaga legislatif dan yudikatif lemah dan tidak berfungsi; kekuatan kontrol non-negara dimatikan sehingga hegemoni pemerintah menjadi sangat luar biasa; dan tidak terbangunnya institusionalisasi demokrasi sehingga proses politik didominasi oleh hak yang memerintah.<sup>8</sup>

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji “Demokrasi Indonesia Masa Reformasi Perspektif A. M. Fatwa (Studi Atas Karyanya “*Demokrasi Teistis*” dan “*Demi Sebuah Rezim*”)”.

Penulis sangat tertarik dari segi tematis pandangan A. M. Fatwa, orang yang berani mengkritik sistem pemerintahan. Beliau pun pernah diadili oleh kekejaman pemerintahan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Masa Reformasi terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI yang mengetahui sistem dan menjadi saksi sejarah Demokrasi Indonesia.

Salah satu alasan mengapa penulis tertarik membahas “Demokrasi Indonesia Masa Reformasi Perspektif A. M. Fatwa (Studi Atas Karyanya “*Demokrasi Teistis*” dan “*Demi Sebuah Rezim*”)”; belum pernah diteliti oleh

---

<sup>8</sup> C.W. Watson, Margono, dan Muhajir Arif Rahmani. “*Membaca A.M. Fatwa (Perubahan dan Konsistensi)*”. (Jakarta: Teraju PT Mizan Publika, 2008).

mahasiswa dan mahasiswi di Jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Pandangan A. M. Fatwa tentang demokrasi Indonesia, mengkaji secara temporal yaitu Masa Reformasi, karena masa ini adalah tahun terbitnya buku karya A. M. Fatwa tentang pandangannya terhadap demokrasi di Indonesia. Selain itu masih banyak lagi karya-karyanya yang di terbitkan sebagai saksi dan pelaku. Karena, pandangan mengenai demokrasi menjadi penting bagi rakyat Indonesia, bagaimana mewujudkan cita-cita demokrasi dan untuk memajukan negara.

Penulis memilih buku yang berjudul Demokrasi Teistis (Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia) dan Demi Sebuah Rezim (Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili)”, sebagai pokok pemikiran karya A. M. Fatwa yang merupakan pandangan hidup pelaku saksi bagi demokrasi Indonesia di Masa Reformasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk lebih terarah dalam penyusunan skripsi ini, maka diambil beberapa permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Riwayat Hidup A. M. Fatwa dan Tela’ah Demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan A. M. Fatwa terhadap Demokrasi Indonesia Masa Reformasi Berdasarkan Karyanya: *Demokrasi Teistis (Upaya Merangkai*



*Integrasi Politik dan Agama di Indonesia) dan Demi Sebuah Rezim (Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili)?*

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ini berdasarkan perumusan masalah diatas dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian penulis adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Riwayat Hidup A. M. Fatwa dan Tela'ah Demokrasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pandangan A. M. Fatwa terhadap Demokrasi Indonesia Masa Reformasi Berdasarkan Karyanya: *Demokrasi Teistis (Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia) dan Demi Sebuah Rezim (Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili)*.

### **D. Kajian Pustaka**

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, sebagai perbandingan serta menghindari terjadinya penelitian yang berulang, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Ada beberapa karya yang dapat dijadikan perbandingan maupun rujukan yang penulis angkat kaitanya dengan pembahasan mengenai “Demokrasi Indonesia Masa Reformasi Perspektif A. M. Fatwa (Studi Atas Karyanya “*Demokrasi Teistis*” dan “*Demi Sebuah Rezim*”)", diantaranya adalah:



1. Karya teks yang terbentuk sebuah buku yang berjudul “Membaca A. M. Fatwa (Perubahan dan Konsistensi)”. Yang ditulis oleh C.W. Watson, Margono, dan Muhajir Arif Rahmani. Diterbitkan oleh Teraju (PT Mizan Publika), Jakarta (2008). Berisikan 3 bab, yaitu: Bab pertama memaparkan tentang kasus unik A. M. Fatwa: Dari tahanan politik menjadi wakil ketua Parlementer. Kedua, memaparkan tentang Nasionalisme Religius dalam perspektif A. M. Fatwa. Dan ketiga, memaparkan studi tentang pemikiran, pergerakan dakwah politik A. M. Fatwa.
2. Karya teks yang terbentuk sebuah buku yang berjudul “Demokrasi Teistis (Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia)”. Yang ditulis A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2001). Berisikan 7 bab, yaitu: Bab pertama memaparkan tentang bersiap untuk masa baru. Kedua, tentang agama dan realitas sosial. Ketiga, dakwah dan integritas umat. Keempat, tentang fitrah, HAM, dan pluralisme. Kelima, tentang PII, HMI, dan GPII. Keenam, tentang orde baru yang berubah. Dan terakhir yang ketujuh yaitu tentang politik islam dan masa depan.
3. Karya teks yang terbentuk sebuah buku yang berjudul “Demi Sebuah Rezim (Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili)”. Yang ditulis oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2000). Berisikan 12 bab, yaitu: Bab pertama memaparkan tentang berhenti dulu!. Kedua, tentang demokrasi dan keyakinan beragama

diadili. Ketiga, tentang suara kritis yang wajar. Keempat, tentang menjelang persidangan. Kelima, tentang 40 tahun setelah merdeka. Keenam, tentang sebuah komedi di pengadilan. Ketujuh, mewujudkan negara hukum Indonesia: sebuah ideologi untuk mubaligh. Kedelapan, tentang vonis. Kesembilan, tentang sebuah vonis. Kesepuluh, tentang permohonan banding tim penasihat hukum. Kesebelas, tentang semua ditolak. Dan terakhir keduabelas tentang catatan akhir.

Dari beberapa karya tulis yang penulis kaji, belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang “Demokrasi Indonesia Masa Reformasi Perspektif A. M. Fatwa (Studi Atas Karyanya “*Demokrasi Teistis*” dan “*Demi Sebuah Rezim*”)”, dan ini tentu saja menjadi perbedaan dasar dengan penelitian yang akan penulis lakukan kedepan. Selain itu, belum ada juga seseorang yang menulis buku yang khususnya tentang pandangan A. M. Fatwa terhadap demokrasi Indonesia.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Upaya yang dilakukan dengan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah, yaitu dengan melakukan empat langkah metode penelitian sejarah, yaitu: *pertama* pengumpulan sumber (*heuristic*), yang dilakukan melalui pencarian dokumen dan juga penelitian sumber bibliografi, *kedua* kritik baik eksternal maupun internal yaitu upaya mendapatkan fakta-fakta yang diharapkan, *ketiga interpretasi* yang merupakan penafsiran dan analisis dari fakta-fakta yang telah didapat dan

telah diuji keontisitasnya, *keempat historiografi*, yaitu penyusunan seluruh rangkaian dari metode penelitian dalam bentuk tulisan.<sup>9</sup> Adapun langkah-langkah tersebut, yaitu:

#### 1. Heuristik

Heuristik yaitu sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah.<sup>10</sup> Dalam metode penelitian sejarah, tahapan heuristik merupakan tahapan pertama. Dalam penelusuran sumber yang akan digunakan dalam penelitian menggunakan sumber-sumber yang berupa sumber tertulis yang relevan dengan judul penelitian. Sementara untuk lokasi sumber sendiri peneliti mencarinya ke berbagai tempat, diantaranya Perpustakaan Batu Api, Perpustakaan Pribadi (Dari hasil pembelian buku secara online), Balai Iklan Pikiran Rakyat, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 1 & 2. Selain itu penulis juga mencari sumber yang berbentuk video yang masih adanya hubungan dengan pembahasan penelitian. Dan penulis mendownload video tersebut di Internet yaitu di YouTube.

Adapun sumber-sumber yang didapatkan selama penelusuran sumber tersebut diantaranya adalah:

##### a. Sumber Primer:

##### 1) Sumber Tertulis

##### a) Arsip atau Dokumen

---

<sup>9</sup> Dudung Abdurahman. *Metode Penelitian Sejarah*. (Jakarta: PT Logos Wancana Ilmu, 1999). Hlm 54.

<sup>10</sup> Herius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: PT Ombak, 1996). Hlm 86.

(1). Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Model F12-DPD.

b) Buku :

(1). Demokrasi Teistis (Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Di Jakarta. Tahun 2001.

(2). Demi Sebuah Rezim (Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Di Jakarta. Tahun 2000.

(3). Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim (Sebuah Skripsi Pembebasan) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh PT Bina Ilmu. Di Surabaya. Tahun 1995.

(4). Dari Mimbar ke Penjara (Suara Nurani Pencari Keadilan dan Kebebasan) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Mizan. Di Bandung. Tahun 1999.

(5). Dari Cipinang ke Senayan (Catatan Gerakan Reformasi dan Aktivitas Legislatif hingga ST MPR 2002) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Intrans. Di Jakarta. Tahun 2003.

- (6). Catatan dari Senayan (Memori Akhir Tugas di Legislatif 1999-2004) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Intrans. Di Jakarta. Tahun 2004.
- (7). Menggugat di Balik Penjara (Surat-surat Politik A. M. Fatwa) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Teraju (PT Mizan Publika). Di Bandung. Tahun 2004.
- (8). Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok (Pengungkap Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Dharmapena Publishing. Di Jakarta. Tahun 2005.
- (9). Satu Islam Multipartai: Membangun Intergritas di Tengah Pruralitas oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Mizan Anggota IKAPI. Di Bandung. Tahun 2002.
- (10). Khutbah-khutbah Politik A. M. Fatwa di Masa Orde Baru oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Di Yogyakarta. Tahun 2007.
- (11). Problem Kemiskinan: Zakat Sebagai Solusi Alternatif oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Belantika. Di Jakarta. Tahun 2005.
- (12). Kampanye Partai Politik Di Kampus oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Di Jakarta. Tahun 2003.

(13). Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi: Jejak Langkah Parleментар Indonesia Periode 1999-2004 oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Di Jakarta. Tahun 2004.

(14). PAN Menyongsong Era Baru: Keharusan Reorientasi oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Republika. Di Jakarta. Tahun 2004.

(15). Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Belantika Anggota IKAPI. Di Jakarta. Tahun 2007.

(16). Satu Dasawarsa Reformasi: Antara Harapan Dan Kenyataan oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh The Fatwa Center. Di Jakarta. Tahun 2008.

c) Koran

(1). Kompas edisi Rabu 18 Agustus 1993. Hlm.16.

(2). Republika edisi Jum'at 20 Agustus 1993. Hlm.1.

(3). Kompas edisi Sabtu 21 Agustus 1993. Hlm.6.

(4). Republika edisi Senin 23 Agustus 1993. Hlm.1.

(5). Republika edisi Selasa 24 Agustus 1993. Hlm.1&12.

(6). PR edisi Rabu 24 November 1993. Hlm.1&4.

(7). Republika edisi Jum'at 1 Juli 1994. Hlm.7.

2) Sumber Benda

a) Audiovisual

Video tersebut berjudul “Episode 84 - A.M. Fatwa” Terlihat dalam video ini A. M. Fatwa di wawancarai oleh Peter. F. Gonthan dalam acara TV Impact. Video tersebut dibuat oleh acara tv swasta yaitu Q Channel atau QTV pada tahun 2004 dan dipublikasikan di YouTobe pada tanggal 18 September 2007 oleh akun impactqtv. Video tersebut yang berdurasi selama 00.58.48 tetapi terpotong-potong menjadi 7 video.

b. Sumber Sekunder

1) Sumber Tertulis

a) Buku :

- (1). Pancasila Demokrasi dan Pencegah Korupsi oleh A. Ubaedillah Diterbitkan oleh Prenadamedia Group. Di Jakarta. Tahun 2015.
- (2). Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi oleh Prof. Dr. Ni'matuul Huda, S.H., M.Hum. dan M. Imam Nasef, S.H., M.H. Diterbitkan oleh Kencana.Cetakan Pertama. Di Jakarta. Tahun 2017.
- (3). Konsepsi Negara Demokrsi Indonesia (Kritik atas Pemikiran Politik Pemerintahan Presiden Soekarno) oleh Abdul Qahar Muzakkar. Diterbitkan oleh Segarsy. Cetakan ke Empat. Di Bandung. Tahun 2015.



- (4). Sejarah dan Budaya Demokrasi (Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Bangsa) oleh Saiful Arif dan Heri Seiyono. Diterbitkan oleh Averroes Press. Di Malang. Tahun 2013.
- (5). Konsep Negara Demokrasi oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Diterbitkan oleh Refika Aditama. Di Bandung. Tahun 2010.
- (6). Membaca A. M. Fatwa (Perubahan dan Konsistensi) oleh C.W. Watson, Margono, dan Muhajir Arif Rahmani. Diterbitkan oleh Teraju (PT Mizan Publika). Di Jakarta. Tahun 2008.
- (7). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 oleh M.C. Ricklefs. Diterbitkan oleh Serambi. Di Jakarta. Tahun 2005.
- (8). Sejarah Lengkap Indonesia: Dari Era Klasik hingga Terkini oleh Adi Sudirman. Diterbitkan oleh Diva Press. Di Yogyakarta. Tahun 2014.

b) Artikel dalam Internet

- (1). Intelijen. “Andi Mappetahang Fatwa, Legenda Penghutbah Politik” dalam, <http://www.intelijen.co.id/andi-mappetahang-fatwa-legenda-pengkhutbah-politik/>. Diakses pada tanggal 11 November 2017, pukul 21:18.

(2). Jurnal Wisuda edisi sosok lembaga: A. M. Fatwa. “Organisasi Alumni UIN Masih Melemah” dalam <http://media.neliti.com/media/publications/219391-sosok-lembaga.pdf>. Diakses pada tanggal 11 November 2017, pukul 21:18.

## 2) Sumber Benda

### a) Foto

- (1). Foto A. M. Fatwa saat di RS Islam Jakarta
- (2). Foto A. M. Fatwa saat di RS AL
- (3). Foto A. M. Fatwa saat digerek untuk hadir dalam persidangan.
- (4). Foto A. M. Fatwa saat bebas penjara

## 2. Kritik

Pada tahapan ini, sumber dikumpulkan pada kegiatan heuristik yang berupa buku-buku yang relevan dengan pembahasan yang terkait, ataupun hasil temuan di lapangan tentang bukti-bukti pembahasan atau topik utama penelitian. Selanjutnya diseleksi dengan mengacu pada prosedur yang ada, yakni sumber yang faktual dan orisinalnya terjamin.<sup>11</sup>

Tahapan kritik memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah otentitas (*authenticity*). Menurut Lucey dalam buku Sjamsuddin, “Sebuah sumber sejarah (catatan harian, surat, buku) autentik atau asli jika benar-benar merupakan produk dari orang yang

---

<sup>11</sup> Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). Hlm 101.

dianggap sebagai pemiliknya (atau dari periode yang dipercayai sebagai masanya jika tidak mungkin menandai pengarangnya) atau jika yang dimaksudkan oleh pengarangnya”. Proses kritik meliputi dua macam, yaitu kritik eksternal dan internal.<sup>12</sup>

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal wajib dilakukan oleh sejarawan untuk mengetahui autentisitas atau keaslian sumber. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” sumber sejarah.

Sebelum semua kesaksian yang berhasil dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan yang ketat. Dalam hal kaitannya dengan kritik eksternal yang dilakukan untuk menentukan otentisitas sumber yang diteliti, yaitu otentik atau tidaknya, utuh atau tidaknya, ataupun asli atau palsu sumber tersebut. Peneliti melakukan pengujian atas asli atau tidaknya sumber tersebut dengan menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila sumber itu merupakan dokumen tertulis, maka harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya dan segi penampilannya yang lain otentisitas itu minimal diuji berdasarkan lima pertanyaan pokok, yaitu: 1) Kapan sumber itu dibuat? 2) Dimana sumber itu dibuat? 3) Siapa yang membuat?

---

<sup>12</sup> Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah ...*, Hlm 102.

4) Dari bahan apa sumber itu dibuat? 5) Apakah sumber itu dalam bentuk asli?<sup>13</sup>

1) Sumber Primer:

a) Sumber Tertulis

(1). Arsip atau Dokumen

(a). Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Model F12-DPD.

Dokumen tersebut bersifat turunan karena sudah berbentuk file Pdf yang bisa di print kapan saja sehingga tidak bisa merubah wujud bentuknya.

(2). Buku :

(a). Demokrasi Teistis (Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia) oleh A. M. Fatwa.

Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Di Jakarta. Tahun 2001. Buku ini merupakan buku

cetakan pertama pada bulan Juni 2001. Di bagian belakang sampul buku ada sedikit sobekan. Bahan

kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih.

(b). Demi Sebuah Rezim (Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan

oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Di Jakarta.

---

<sup>13</sup> Dudung Abdurahman. *Metode Penelitian Sejarah...* Hlm 59-60.

Tahun 2000. Buku ini merupakan buku asli edisi kedua. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih.

(c). Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim (Sebuah Skripsi Pembebasan) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh PT Bina Ilmu. Di Surabaya. Tahun 1995. Buku ini merupakan buku asli edisi pertama. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih tetapi karena telah termakan oleh umur, kertas buku tersebut menjadi warna kekuningan. Selain itu, kertasnya berhamburan karena lemnya sudah tidak menempel.

(d). Dari Mimbar ke Penjara (Suara Nurani Pencari Keadilan dan Kebebasan) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Mizan. Di Bandung. Tahun 1999. Buku ini berbentuk salinan atau turunan. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih.

(e). Dari Cipinang ke Senayan (Catatan Gerakan Reformasi dan Aktivitas Legislatif hingga ST MPR 2002) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Instrans. Di Jakarta. Tahun 2003. Bahan kertas buku tersebut

merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih.

(f). Catatan dari Senayan (Memori Akhir Tugas di Legislatif 1999-2004) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Intrans. Di Jakarta. Tahun 2004. Buku ini merupakan buku asli edisi pertama pada bulan Februari. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih.

(g). Menggugat di Balik Penjara (Surat-surat Politik A. M. Fatwa) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Teraju (PT Mizan Publika). Di Bandung. Tahun 2004. Buku ini merupakan buku asli edisi pertama pada bulan Maret. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih.

(h). Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok (Pengungkap Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Dharmapena Publishing. Di Jakarta. Tahun 2005. Buku ini berbentuk salinan atau turunan. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih.

(i). Satu Islam Multipartai: Membangun Intergritas di Tengah Pruralitas oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Mizan Anggota IKAPI. Di Bandung. Tahun 2002. Buku ini merupakan cetakan yang kedua. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih. Diketik menggunakan komputer dan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12.

(j). Khutbah-khutbah Politik A. M. Fatwa di Masa Orde Baru oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Di Yogyakarta. Tahun 2007. Buku ini merupakan cetakan yang pertama. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih. Diketik menggunakan komputer dan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12.

(k). Problem Kemiskinan: Zakat Sebagai Solusi Alternatif oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Belantika. Di Jakarta. Tahun 2005. Buku ini berbentuk salinan atau turunan. Buku ini merupakan cetakan yang kedua. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih. Diketik menggunakan komputer



dan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12.

(l). Kampanye Partai Politik Di Kampus oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Di Jakarta. Tahun 2003. Buku ini berbentuk salinan atau turunan. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih. Diketik menggunakan komputer dan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12.

(m). Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi: Jejak Langkah Parlementer Indonesia Periode 1999-2004 oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Di Jakarta. Tahun 2004. Buku ini berbentuk buku asli. Buku ini merupakan buku cetakan pertama. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih namun kertasnya mulai menguning karena termakan usia dan dipinggir buku sudah mulai kotor sebab debu menempel karena terbasahi air. Diketik menggunakan komputer dan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12.

(n). PAN Menyongsong Era Baru: Keharusan Reorientasi oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Republika. Di Jakarta. Tahun 2004. Buku ini berbentuk salinan atau turunan. Merupakan cetakan yang kedua. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih dan mulai menguning karena termakan oleh usia. Kertasnya ada noda bekas terkena air. Diketik menggunakan komputer dan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12.

(o). Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Belantika Anggota IKAPI. Di Jakarta. Tahun 2007. Buku ini berbentuk salinan atau turunan. Merupakan cetakan yang kedua. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih. Diketik menggunakan komputer dan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12.

(p). Satu Dasawarsa Reformasi: Antara Harapan Dan Kenyataan oleh A.M. Fatwa. Diterbitkan oleh The Fatwa Center. Di Jakarta. Tahun 2008. Buku ini berbentuk salinan atau turunan. Merupakan cetakan buku yang pertama. Bahan kertas buku tersebut

merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih. Diketik menggunakan komputer dan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12.

(3). Koran :

- (a). Kompas edisi Rabu 18 Agustus 1993. Hlm.16.
- (b). Republika edisi Jum'at 20 Agustus 1993. Hlm.1.
- (c). Kompas edisi Sabtu 21 Agustus 1993. Hlm.6.
- (d). Republika edisi Senin 23 Agustus 1993. Hlm.1.
- (e). Republika edisi Selasa 24 Agustus 1993. Hlm.1&12.
- (f). PR edisi Rabu 24 November 1993. Hlm.1&4.
- (g). Republika edisi Jum'at 1 Juli 1994. Hlm.7.

Sedangkan untuk sumber yang berasal dari media cetak penulis mendapatkannya di Balai Iklan Pikiran Rakyat dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 1&2 yang terletak di Jakarta. Kertasnya sudah menguning karena sudah lama, tulisannya menggunakan tinta hitam dan ada beberapa lembar koran yang sulit terbaca karena sudah lama. Karena sumber yang berasal dari media cetak ini merupakan bagian dari arsip, maka penulis hanya bisa memfotonya menggunakan kamera hp dan ada pula dengan cara

memfotocopy korannya dibantu oleh petugas perpustakaan. Sehingga sumber ini merupakan primer turunan karena telah disalin atau dicopy terlebih dahulu.

b) Sumber Benda

(1). Audiovisual

(a). Video tersebut berjudul “Episode 84 -A. M. Fatwa”

Terlihat dalam video ini A. M. Fatwa di wawancarai oleh Peter. F. Gonthan dalam acara TV Impact. Video tersebut dibuat oleh acara tv swasta yaitu Q Channel atau QTV pada tahun 2004 dan dipublikasikan di YouTube pada tanggal 18 September 2007 oleh akun impactqtv. Video tersebut yang berdurasi selama 00.58.48 tetapi terpotong-potong menjadi 7 video. Yaitu sebagai berikut:

- Video Part 1 : Durasi 00.09.25
- Video Part 2 : Durasi 00.09.24
- Video Part 3 : Durasi 00.09.25
- Video Part 4 : Durasi 00.09.24
- Video Part 5 : Durasi 00.09.25
- Video Part 6 : Durasi 00.09.25
- Video Part 7 : Durasi 00.03.00

Kritik eksternal dari video ini yaitu bahwa kualitas video masih bagus dan video sudah berwarna karena merupakan video pada tahun 2004 yang sudah maju dalam perkembangan perfilman acara TV. Selain itu dari kekurangan video ini adalah durasi 00.58.48 tetapi terpotong-potong menjadi 7 video. Dan ada salah satu video yang macet saat video tersebut diputarkan.

b. Kritik Internal

Kritik internal kebalikan dari kritik eksternal, kritik internal menekankan aspek “dalam”, yaitu “isi” dari sumber: kesaksian (*testimoni*). Setelah fakta kesaksian (*Fact of testimoni*) ditegaskan melalui kritik eksternal, sejarawan mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu. Ia harus memutuskan kekasaksian itu dapat diandalkan (*reliable*) atau tidak. Keputusan ini didasarkan atas penemuan dua penyelidikan (*inkuiri*).<sup>14</sup>

1) Sumber Primer:

a) Sumber Tertulis

(1). Arsip atau Dokumen

- (a). Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Model F12-DPD.

---

<sup>14</sup> Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah ...*, Hlm 104.

Isi dari dokumen tersebut adalah riwayat hidup A. M. Fatwa dan dilengkapi dengan adanya tanda tangan A. M. Fatwa diatas materai, sehingga dapat dikatakan bahwa dokumen tersebut bukanlah palsu.

(2). Buku :

(a). Demokrasi Teistis (Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia) oleh A.M. Fatwa. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Di Jakarta. Tahun 2001. Dalam buku Demokrasi teistis ini merupakan upaya mencari keterkaitan antara Islam dengan demokrasi atau sebaliknya demokrasi dan Islam. Selain itu buku ini juga banyak menengok masa lalu, setidaknya dalam wilayah wacana, akan membantu menyegarkan kita terhadap cita-cita dan tujuan reformasi yang kita perjuangkan.

(b). Demi Sebuah Rezim (Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili) oleh A.M. Fatwa. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Di Jakarta. Tahun 2000. Buku ini adalah sebuah momen yang dibangun oleh A. M. Fatwa untuk mengingatkan kita semua agar bersama-sama membangun sebuah sistem yang menghindarkan bangsa kita dari

tidak aniaya ada terror di bangsa kita sendiri. Dalam buku ini merekam berbagai fakta dan peristiwa yang terjadi pada tahun 1980-an, dimana rezim Orde Baru masih begitu kuat dan Berjaya untuk memakakan kehendaknya. Dan memperlihatkan tindakan rezim Orde Baru dalam meredam dan mematahkan perlawanan rakyat.

(c). Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim (Sebuah Skripsi Pembebasan) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh PT Bina Ilmu. Di Surabaya. Tahun 1995. Buku ini membahas kisah singkat perjalanan penulis yang melatarbelakangi lahirnya “skripsi pembebasan” itu, menyajikan pikiran-pikiran A. M. Fatwa berkaitan dengan skripsinya yang berisi pandangannya sebagai seorang muslim terhadap ideologi negara Pancasila dan UUD 1945. Dan tanggapan berbagai media masa terhadap A. M Fatwa sebagai salah satu terpidana atas peristiwa Tanjung Priok. Pada bagian ini, tampak secara kronologis perjalanan hidup A. M. Fatwa sebelum, selama, dan sesudah mengalami masa penahanan, baik mengenai pandangan hidupnya



maupun garis politiknya yang memperjuangkan demokrasi.

(d). Dari Mimbar ke Penjara (Suara Nurani Pencari Keadilan dan Kebebasan) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Mizan. Di Bandung. Tahun 1999. Buku ini membahas tentang yang *Pertama*, Narapidana Politik: Kisah Pergolakan Batin Dari Penjara Ke Penjara. *Kedua*, Sebagai Umat Islam: Berpolitik Adalah Ibadah. Dan *Ketiga*, Sebagai Warga Negara Menghidupkan Budaya Demokrasi.

(e). Dari Cipinang ke Senayan (Catatan Gerakan Reformasi dan Aktivitas Legislatif hingga ST MPR 2002) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Intrans. Di Jakarta. Tahun 2003. Buku ini berisikan catatan-catatan reflektif atas perjalanan hidup pribadi dan sosial politik ini menunjukkan betapa nisbinya kehidupan politik itu. Ini tentunya sangat penting dan berharga bagi generasi penerus, utamanya di kalangan pemuda. Banyak pelajaran dan hikmah yang dapat diambil untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan inspirasi bagi generasi muda penerus perjuangan bangsa dalam

melangkah menyertai perjalanan bangsa menuju cita-cita Proklamasi.

(f). Catatan dari Senayan (Memori Akhir Tugas di Legislatif 1999-2004) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Intrans. Di Jakarta. Tahun 2004. Buku ini merekam beragam fakta dan peristiwa yang terjadi terkait dengan keberadaan MPR dan DPR dalam periode 1999-2004, lembaga perwakilan hasil pemilu pertama di era Reformasi. Fakta dan peristiwa itu pula yang akan menggambarkan keberadaan dan kedudukan saudara A. M. Fatwa di tengah-tengah usaha memperjuangkan cita-cita reformasi di segala aspek kehidupan melalui kelembagaan legislatif.

(g). Menggugat di Balik Penjara (Surat-surat Politik A. M. Fatwa) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Teraju (PT Mizan Publika). Di Bandung. Tahun 2004. Buku ini berisikan surat-surat politik A. M. Fatwa yang dikirim ke berbagai tokoh, pemimpin dan teman-teman seperjuangan. Dengan melalui surat-surat tersebut A. M. Fatwa menjaga tali silaturahmi dengan semaksimal mungkin dengan cara media apapun. Bayangkan, ketika

beliau berada di penjara sebagai tahanan politik, dia dengan sangat rajin dan tekun menulis surat ke berbagai kalangan, baik kepada teman-teman dekatnya maupun kalangan lain yang ada kaitannya dengan isu dan gagasan yang sedang dipikirkannya. Ini semua tentu tidak akan dilakukan manakala orang tidak memiliki semangat yang tinggi untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan.

(h). Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok (Pengungkap Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Dharmapena Publishing. Di Jakarta. Tahun 2005. Buku ini bukan hanya menganalisis peristiwa Tanjung Priok dan beberapa versi yang ada, tetapi juga melaporkan tarikan-tarikan politik era transisi tersebut hingga keluarnya putusan tingkat pertama Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok.

(i). Satu Islam Multipartai: Membangun Integritas di Tengah Pruralitas oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Mizan Anggota IKAPI. Di Bandung. Tahun 2002. Buku ini menjelaskan tentang demokrasi dan etika politik. Pluralisme dan Integritas Umat, serta kekuasaan dan visi kepemimpinan.

(j). Khutbah-khutbah Politik A.M. Fatwa di Masa Orde Baru oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Di Yogyakarta. Tahun 2007. Buku ini bukan merupakan kelanjutan fungsi akan bukti keistiqomahan dan konsistensi di dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang dai, tapi juga memberikan kepada kita gambaran tentang pergerakan umat Islam, pergolakan umat Islam, dinamika umat Islam, bukan hanya pada masa Orde Baru tetapi juga pada masa jauh sebelum masa Orde Baru itu terjadi.

(k). Problem Kemiskinan: Zakat Sebagai Solusi Alternatif oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Belantika. Di Jakarta. Tahun 2005. Pembahasan dalam buku ini tentang masalah zakat secara komprehensif. Buku ini pun menjelaskan bahwa zakat tidak hanya dari sisi landasan fiqih syariah, tetapi juga dari sisi regulasi pemerintahan maupun dari sisi pelaku bisnis yang terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro yang tentu saja sangat erat dengan masyarakat lapisan bawah. Dan dalam buku ini menyebutkan bahwa salah satu sarana efektif dengan menggunakan syariah yaitu melalui

lembaga keuangan mikro dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan.

- (l). Kampanye Partai Politik Di Kampus oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Di Jakarta. Tahun 2003. Buku ini menjelaskan tentang pengadaan kampanye partai politik di kampus. Dengan cara mengadakan pembelajaran politik seperti mengizinkan parpol memberikan pendidikan politik di kampus. Pendidikan politik itu mencakup penyampaian *platform* parpol dan debat calon presiden. Sehingga dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Selain itu dapat meningkatkan rasa demokrasinya terhadap mahasiswa.

(m). Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi: Jejak Langkah Parlementer Indonesia Periode 1999-2004 oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Di Jakarta. Tahun 2004. Dalam buku ini mengulas tentang sejarah dan pelaksanaan fungsi DPR hasil pemilu 1999 yang mempunyai masa bakti lima tahun, yaitu tahun 1999- 2004. Jika dilihat dari semua penjelasan isi

buku ini, dapat disimpulkan bahwa A. M. Fatwa memahami dan menguasai seluk-beluk DPR, termasuk bagaimana pelaksanaan fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.

(n). PAN Menyongsong Era Baru: Keharusan Reorientasi oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Republika. Di Jakarta. Tahun 2004. Buku ini menjelaskan tentang Mengapa Reorientasi?, Kilas Balik PAN sebagai Partai Baru Era Reformasi, Membaca Posisi PAN pada Pemilu 2004, PAN di Tengah Latar Transisi Demokrasi, Menilik Pengalaman Partai Politik Manca Negara, Tantangan Baru dan Pentingnya Reorientasi dan Tiga Agenda Utama

(o). Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Belantika Anggota IKAPI. Di Jakarta. Tahun 2007. Secara garis besar pada buku ini menjelaskan tentang Islam dan terorisme. Karena, maraknya oknum teroris adalah seorang muslim, sehingga di luar negeri pun mengklaim bahwa teroris pasti ada hubungan dengan muslim.

(p). Satu Dasawarsa Reformasi: Antara Harapan Dan Kenyataan oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh The Fatwa Center. Di Jakarta. Tahun 2008. Buku ini secara gamblang menjelaskan bahwa komponen-komponen reformasi. Dan mengkaji harapan reformasi dan realita yang dihasilkan oleh reformasi. Paparan pada konteks ini memfokuskan pada aktor/pelaku agar dapat menjelaskan dinamika transisi dari sistem otoriter ke sistem demokrasi. Dalam sebuah proses transisi dari rezim otoriter ke rezim demokrasi selalu melibatkan aktor-aktor. Aktor-aktor inilah yang senyatanya menggerakkan dan mengarahkan reformasi.

(3). Koran :

(a). Kompas edisi Rabu 18 Agustus 1993. Hlm.16.

(b). Republika edisi Jum'at 20 Agustus 1993. Hlm.1.

(c). Kompas edisi Sabtu 21 Agustus 1993. Hlm.6.

(d). Republika edisi Senin 23 Agustus 1993. Hlm.1.

(e). Republika edisi Selasa 24 Agustus 1993.  
Hlm.1&12.

(f). PR edisi Rabu 24 November 1993. Hlm.1&4.

(g). Republika edisi Jum'at 1 Juli 1994. Hlm.7.

Sedangkan untuk sumber yang berasal dari media cetak penulis mendapatkannya tidak hanya dari satu media cetak saja, tetapi dari berbagai media cetak. Sehingga dapat dijadikan perbandingan dan penguat terhadap berita yang diterbitkan oleh media-media cetak tersebut. Sumber media cetak yang didapatkan merupakan sumber yang sezaman dan berkaitan dengan salah satu yang menjadi pembahasan di sub biografi A. M. Fatwa yaitu berita saat ia di masukkan penjara sampai ia dinyatakan bebas dari tahanan.

b) Sumber Benda

(1). Audiovisual

Video tersebut berjudul “Episode 84 -A. M. Fatwa” Terlihat dalam video ini A.M. Fatwa di wawancarai oleh Peter. F. Gonthan dalam acara TV Impact. Video tersebut dibuat oleh acara tv swasta yaitu Q Channel atau QTV pada tahun 2004 dan dipublikasikan di YouTube pada tanggal 18 September 2007 oleh akun impactqtv. Video tersebut yang berdurasi selama 00.58.48 tetapi terpotong-potong menjadi 7 video. Yaitu sebagai berikut:

(a). Video Part 1 : Durasi 00.09.25, dalam videonya membahas tentang penyakit hepatitis yang dia



alami setelah dari penjara. Karena, saat di penjara selalu di suntik. Selain itu membahas juga tentang riwayat tempat tinggal A. M. Fatwa di Bugis (Bone).

(b). Video Part 2 : Durasi 00.09.24, dalam video ini ia menceritakan alasan meninggalkan kampung halamannya, menceritakan juga bahwa orang bugis sedang berusaha meluruskan sejarah bahwa Arutpalaka disebut penghianat. Dan juga menceritakan bahwa di daerah tempat tinggalnya dalam agama islamnya masih berpikir irasional. Selain itu ia menceritakan awal mulai pergi ke Makasar.

(c). Video Part 3 : Durasi 00.09.25, dalam video ini ia menceritakan bahwa beliau pernah menjadi ketua komosariat dari pelajar-pelajar calon perwira angkatan laut dari berbagai jurusan. Kemudian konges di Malang tahun 1962 menggantikan Tarmiji Taher untuk menjadi ketua pelajar calon pertiwa angkatan laut seluruh Indonesia. Selain itu mencerita nama-nama gelar marga di daerah kampungnya termasuk dengan nama A. M. Fatwa

sendiri. Ia juga menceritakan saat menjadi angkatan laut.

(d). Video Part 4 : Durasi 00.09.24, dalam video ini menceritakan tentang saat ia di tahan di Solo, Karang Anyar dan Temangu. Dan ia di bebaskan oleh Sucipto Yudo Diharjo. Ia tidak menjadi perwira tetapi ia menjadi pegawai sipil angkatan laut. Ia pun menjadi penengah untuk permasalahan keresahan rakyat. Di DKI pada tahun 1979 di berhentikan. Dan menceritakan ia diajak oleh Abdul Gofur untuk aktif di Golkar. Tetapi ditentang oleh Ali Sadiqin.

(e). Video Part 5 : Durasi 00.09.25, dalam video ini menceritakan tentang Ali Sadiqin menjadi dekat dengan tokoh ulama-ulama. Dia juga meluruskan bahwa beliau tidak menjadi salah satu otak pemboman di BCA. Karena beliau selalu di hubung-hubungkan dengan peristiwa Tanjung Priok. Amir Mahmud memecat A. M. Fatwa karena dianggap pesta atas kemenangan PPP di Jakarta.

(f). Video Part 6 : Durasi 00.09.25 dalam video ini menceritakan tentang anaknya yang menjadi wartawan atau jurnalis bekerja di radio Australia.

Dan menceritakan tentang buku-buku yang dia tulis. Ia pun mendapat penghargaan dari MUSEUM INDONESIA dari seorang legislatif yang banyak menulis buku.

(g). Video Part 7 : Durasi 00.03.00 dalam video ini menceritakan tentang terpilihnya ia menjadi wakil ketua MPR RI dari perbedaan dua suara. Selain itu ia memberi pesan untuk semua masyarakat di Indonesia.

### 3. Interpretasi

Interpretasi harus berbicara sendiri. Kemampuan interpretasi adalah menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah, serta menjelaskan masalah kekinian. Tidak ada masa lalu dalam konteks sejarah yang aktual karena yang ada hanyalah interpretasi historis. Tidak ada interpretasi yang bersifat final, sehingga setiap generasi berhak mengarang interpretasinya sendiri.<sup>15</sup>

Dalam tahapan interpretasi ini penulis akan mencoba mengkaji dan menela'ah serta menafsirkan "Demokrasi Indonesia Masa Reformasi Perspektif A. M. Fatwa (Studi Atas Karyanya "*Demokrasi Teistis*" dan "*Demi Sebuah Rezim*")" sebab, pada dasarnya proses interpretasi ini dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan.

---

<sup>15</sup> Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah ...*, Hlm 107.

Bahwa, demokrasi Indonesia berawal pada percobaan demokrasi pada tahun 1950-1957, dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 1957-1965. Lalu dilanjutkan menciptakan orde baru pada tahun 1965-1975 dan dilanjutkan kembali pada masa keemasan orde baru 1976-1988 setiap dalam kejayaan pasti ada keruntuhan, masa keruntuhan dan kehancuran orde baru pada tahun 1989-1998. Setelah itu pemerintahan di lanjut dengan masa reformasi hingga sekarang.<sup>16</sup>

Dari masa-kemasa demokrasi berjalan dan berkembang dengan adanya perubahan-perubahan dari setiap kebijakan pemimpin serta diperkuat dengan adanya undang-undang dasar dan pancasila. Dari pengalaman-pengalaman perubahan demokrasi, Indonesia telah mengalami pertumpahan darah akan kejamaan kekuasaan yang dimanfaatkan untuk menguasai negara selama hidupnya. Sehingga rakyat Indonesia pun resah dan merasa takut akan kejamnya pemerintah. Berbeda dengan A. M. Fatwa, ia menjadi salah seorang tokoh pengkritik pemerintahan yang menuntut keadilan masyarakat untuk mendapatkan hidup yang layak tanpa adanya kekejaman dari tangan-tangan pemimpin. Seakan dalam negara rakyat tak bisa bebas menyampaikan berbicara dan pendapat untuk pemerintah dalam memajukan negara. Akibat dari kritikan terhadap pemerintahan bisa dipenjarakan bahkan di bunuh sekalipun.

---

<sup>16</sup> MC. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005). Hlm. 471.

#### 4. Historiografi

Historiografi adalah proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah. Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, sejarawan harus mempertimbangkan struktur dan gaya bahasa penulisannya. Sejarawan harus menyadari dan berusaha agar orang lain dapat memahami pokok-pokok pemikiran yang diajukan.<sup>17</sup>

Dalam tahapan historiografi ini penulis akan memaparkan hasil dari berbagai penemuan dari lapangan dan setelah melakukan dari berbagai proses penelitian dengan beberapa metode yang dilakukan oleh penulis.

Historiografi yaitu hasil penelitian, dalam tahapan ini penulis menyajikan keseluruhan isi skripsi dalam uraian dengan bahasa yang sederhana dan tidak lepas dari EYD. Dalam tahapan penulisan ini, penulis menggunakan model penulisan evolusi. Penulis mengkajikan tentang “Demokrasi Indonesia Masa Reformasi Perspektif A. M. Fatwa (Studi Atas Karyanya “*Demokrasi Teistis*” dan “*Demi Sebuah Rezim*”)”.

Uraian dalam tulisan akan disistematiskan kedalam beberapa sub-sub topik bahasan, yaitu:

Bab I : Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, dan langkah-langkah penulisan.

---

<sup>17</sup> Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah ...*, Hlm 147.

Bab II : Riwayat Hidup A. M. Fatwa dan Tela'ah Demokrasi di Indonesia didalamnya memaparkan Biografi A. M. Fatwa, Karya Tulis A. M. Fatwa, Pengertian Demokrasi, Macam-macam Demokrasi, Sejarah Demokrasi, Sekilas Sejarah Demokrasi Indonesia, Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi dan Pandangan Tokoh-tokoh Mengenai Demokrasi Indonesia.

Bab III : Pandangan A. M. Fatwa terhadap Demokrasi Indonesia Masa Reformasi Berdasarkan Karyanya: *Demokrasi Teistis (Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia)* dan *Demi Sebuah Rezim (Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili)* didalamnya memaparkan Analisa Buku A. M. Fatwa, Pengertian Demokrasi Menurut A. M. Fatwa, Konsepsi Demokrasi Menurut A. M. Fatwa, Pandangan A. M. Fatwa terhadap Demokrasi Indonesia, Kritik Penolakan A. M. Fatwa terhadap Praktek Demokrasi Indonesia masa Orde Lama dan Orde Baru, dan Demokrasi Indonesia Masa Reformasi menurut A. M. Fatwa.

Bab IV : Penutup yang diisi oleh Kesimpulan dan Saran, dan terakhir Daftar Pustaka.